

Politik Identitas Era *Post-Truth* di Indonesia dalam Perspektif *Language Games* Ludwig Wittgenstein

Gregorius Loudowick Lengga Wangge¹, Robertus Wijanarko²
^{1,2}Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Malang, Indonesia
E-mail: gregoriuswangge17@gmail.com¹, rwijanarko68@gmail.com²

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 01-11-2022	Direview: 03-11-2022	Publikasi: 30-06-2023

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggali pemikiran Ludwig Wittgenstein tentang *language games* yang sekiranya sesuai untuk merawat dunia politik Indonesia. Pada era *post-truth* ini, fenomena politik identitas yang mengusung isu keagamaan sedang marak terjadi di Indonesia yang notabene adalah bangsa yang plural. Kebenaran tidak lagi mudah untuk dikenali secara objektif karena adanya unsur politik kepentingan berkedok identitas, dengan dalihnya yang melibatkan aspek emosional publik. Alhasil kebenaran objektif menjadi tersamarkan oleh nuansa emosional keagamaan yang terbentuk. Dalam menganalisis fenomena tersebut, peneliti menggunakan metode pembacaan kritis terhadap kajian pustaka yang berkaitan dengan tema. Sumber data primer adalah buku dan artikel terkait pemikiran Ludwig Wittgenstein, yang kemudian disajikan dan dianalisis secara naratif-deskriptif. Melalui perspektif *Language Games* Ludwig Wittgenstein. Peneliti menyadari kembali jati diri pluriformitas Bangsa Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pemikiran Wittgenstein, peneliti menganalisis kemajemukan bangsa Indonesia sebagai suatu fakta objektif yang menggambarkan realitas bangsa Indonesia sesungguhnya. Peneliti menemukan bahwa realitas pluriformitas tersebut adalah realitas yang tidak terbantahkan dan menyadari setiap rakyatnya akan adanya otonomi dan adanya *language games* masing-masing yang tidak dapat dicampuradukkan. Maka dari itu, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan perlu idealisasi ke arah kesatuan yang saling menghargai. Hal itu terangkum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kata Kunci: politik identitas; era *post-truth*; Indonesia; *language games*; Wittgenstein

Abstract

This paper aims to explore Ludwig Wittgenstein's thoughts on Language Games which are appropriate for treating the Indonesian political world. In this post-truth era, the phenomenon of identity politics that carries religious issues is currently rife in Indonesia, which incidentally is a plural nation. The truth is no longer easy to recognize objectively because there is an element of political interest under the guise of identity, under the pretext of involving the emotional aspect of the public. As a result, objective truth becomes obscured by the emotional nuances of religion that are formed. In analyzing this phenomenon, the researcher uses a critical reading method of literature review related to the theme. The primary data sources are books and articles related to Ludwig Wittgenstein's thoughts, which are then presented and analyzed in a narrative-descriptive manner. Through the perspective of Ludwig Wittgenstein's Language Games, the researcher reawakens the pluralistic identity of the Indonesian nation in the spirit of Bhinneka Tunggal Ika. Through Wittgenstein's thought, the researcher analyzes the diversity of the Indonesian nation as an objective fact that describes the real reality of the Indonesian nation. The researcher finds that the reality of pluriformity is an undeniable reality and makes every citizen aware of the existence of autonomy, the existence of their respective language games which cannot be mixed up. Therefore, to realize unity and oneness, it is necessary to idealize towards a unity that respects each other. This is summarized in the motto Bhinneka Tunggal Ika

Keywords: identity politics; post truth era; Indonesia; language games; Wittgenstein

1. Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa dan negara yang mempunyai pluriformitas yang begitu khas dan kaya. Beraneka ragam suku, kebudayaan, adat istiadat, agama, dan bahasa menjadi latar belakang masyarakat negara kepulauan yang kurang lebih memiliki 17.000 pulau tersebut. Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa bangsa Indonesia amat majemuk dalam hal bahasa, budaya, ras, agama, dan etnik. Perbedaan yang ditimbulkan oleh kemajemukan ini adalah hal yang luar biasa (A. Riyanto (ed), 2021). Hal tersebut merupakan suatu kebanggaan dan kekayaan tersendiri bagi Indonesia sepanjang sejarahnya. Namun, keanekaragaman yang menjadi milik bangsa Indonesia tidak lagi dilihat sebagai suatu kebanggaan yang harus dicintai dan dipertahankan, melainkan sebagai sebuah ancaman yang mesti disingkirkan. Berbagai peristiwa terkait munculnya gerakan fundamentalisme, populisme, dan radikalisme agama akhir-akhir ini seakan menjadi cermin bahwa eksistensi Pancasila telah ditunggangi oleh persoalan kebhinnekaan yang dipelopori sejumlah pihak yang bersikap antipluralitas. Bagi mereka, kesatuan Indonesia harus diperjuangkan atas satu bahasa, satu suku, dan terutama harus satu agama (Herianto & Wijanarko, 2022). Wacana yang sangat gencar diagendakan oleh kelompok-kelompok tersebut ialah memperjuangkan syariat Islam dan penegakan *khilafah Islamiyyah* di Indonesia.

Di sisi lain, dunia saat ini sedang memasuki era baru yakni "*post-truth*" (pascakebenaran). Salah satu ciri khas dari era ini adalah bahwa daya tarik emosional lebih berpengaruh dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya (Daryanto, 2022; Eko Suharyanto, 2019). Celah itulah yang dipakai kelompok-kelompok radikal untuk menarik emosional publik dan menjaring massa demi kepentingan memecah-belah bangsa (Hilmy, 2020). Salah satunya adalah isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan). Mereka mengetahui bahwa isu SARA, terutama agama, sangat sensitif di Indonesia yang multikultural. Maka tidak heran, apabila metode itu biasanya dipakai untuk mengalihkan dan menyamarkan kepentingan kelas (Wisnu, 2019). Selain itu, tema-tema sentral wacana politik seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kemakmuran, yang melibatkan kekuatan emosional juga sangat rentan untuk dimanipulasi menjadi alat propaganda (Wijanarko, 2021). Artinya, bahasa-bahasa politik yang terkait dengan tema-tema tersebut, dapat digunakan sebagai senjata untuk mobilisasi massa, daripada digunakan untuk mengartikulasikan konsep-konsep politik yang berharga dan rasional. Dalam kontestasi politik, tema-tema itu rentan untuk disisipkan nilai-nilai atau sistem kepercayaan lain secara manipulatif, alih-alih digunakan untuk mengartikulasikan makna otentik dari tema-tema tersebut. Maka, halnya semakin rumit ketika tema-tema politik itu dicampuradukkan dengan isu agama demi kepentingan kelompok tertentu. Pilpres 2019 telah menjadi saksi atas hal tersebut. Salah satu gejala politik identitas keagamaan saat itu adalah Gerakan #2019GantiPresiden. Gerakan ini merupakan manifestasi sikap kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai "kurang memuaskan" (Kurniawan, 2018). Namun ironisnya, motif dari gerakan tersebut sarat dengan politisasi agama.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa penghayatan kebhinnekaan rakyat Indonesia masih jauh dari ideal. Di satu sisi, kita mengaku bahwa jati diri kita adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, tapi di lain sisi diskriminasi terjadi di mana-mana, rasisme menjadi hal yang biasa, dan intoleransi menjadi hal yang dapat ditoleransi. Ironisnya, objek dari aksi-aksi intoleran tersebut seringkali adalah kaum minoritas. Ini adalah dualisme. Padahal, Soekarno, Presiden Pertama RI, pernah berkata, "negara Indonesia bukan suatu negara untuk satu orang, bukan suatu negara untuk satu golongan. Tetapi kita mendirikan negara 'semua buat semua, 'satu buat semua', 'semua buat satu' (Riyanto, 2014)". Maka, kredibilitas eksistensi rakyat Indonesia masa sekarang sebagai pewaris harta dan cita-cita leluhur para pendiri bangsa ini patut dipertanyakan.

Menyikapi berbagai peristiwa dan fenomena di tanah air tersebut, masyarakat Indonesia mutlak untuk kembali sadar akan jati diri mereka sebagai bangsa yang multikultural. Perlu disadari bahwa sebelum agama-agama besar di dunia, khususnya Hindu, Budha, Islam, dan Kristen masuk dan memengaruhi kebudayaan masyarakat setempat, berbagai suku asli telah mengenal nilai-nilai luhur yang menjadi unsur pembentukan sila-sila Pancasila. Bangsa Indonesia sejatinya hanya bisa bertahan dalam persatuan jika menghargai keanekaragaman, mengedepankan solidaritas, dan mengakui Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah "perekat" bangsa Indonesia (Riyanto dkk., 2015). Semboyan Bhinneka Tunggal Ika hendaknya senantiasa menjadi prinsip dalam kehidupan bersama rakyat Indonesia di tengah aneka perbedaan yang ada. Sejalan dengan usaha menghargai keanekaragaman, pemikiran *language games* Wittgenstein kiranya dapat membantu dalam menggali makna kesatuan dan keanekaragaman dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi keberlangsungan bangsa Indonesia yang multikultural. Bagi

Wittgenstein, persatuan dalam kenyataan pluriformitas itu perlu dimengerti sesuai dengan “aturan yang berlaku” dalam sebuah permainan demi menentukan sebuah kebenaran, seperti arti kata-kata yang tergantung dari penggunaannya (*the meaning is the use/the meaning is in the use*). Arti sebuah kata itu seluruhnya tergantung dari tempatnya di dalam salah satu “permainan bahasa” dan juga dari kedudukan “permainan bahasa” itu dalam konteks hidup dan kegiatan (Bakker, 1984). Contohnya seperti penggunaan bidak-bidak dalam permainan catur (Wittgenstein & Anscombe, 1967).

Dalam perspektif *Language Games* Ludwig Wittgenstein, pluriformitas atau keanekaragaman merupakan fakta atau gambaran objektif tentang realitas yang sesungguhnya (Mustansyir, 1995). Sama halnya dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai cerminan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia yang dapat dianalisis dengan konsep pluriformitas (keanekaragaman). Mustansyir mengungkapkan bahwa keanekaragaman suku, adat-istiadat, dan agama adalah suatu kenyataan objektif yang menjadi latar belakang historik bangsa Indonesia. Pancasila dan kebhinnekaan sudah seharusnya mendapat tempat yang layak dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, keanekaragaman atau perbedaan tersebut tidak jarang dieksploitasi oleh sejumlah pihak yang memicu terjadinya konflik dan perpecahan. Artinya, bangsa Indonesia belum menjadikan fakta keanekaragaman sebagai kekayaan yang harus dibanggakan dan dijaga, melainkan masih menganggap keanekaragaman sebagai ancaman yang harus disingkirkan.

Suatu ironi sedang terjadi di Indonesia. Sejumlah pihak berusaha untuk mengingkari jati diri mereka sebagai bangsa yang plural demi kepentingan politik kelompok mereka sendiri yang berbasiskan keagamaan. Dalam tulisan ini, peneliti memilih pemikiran Ludwig Wittgenstein tentang *Language Games* untuk mengatasi fenomena politik identitas tersebut, terlebih khusus di era *post-truth* dewasa ini. Keterkaitan antara politik identitas keagamaan di Indonesia dengan pemikiran Ludwig Wittgenstein tentang *Language Games* menarik untuk dikaji lebih jauh. Hal inilah yang akan peneliti uraikan dalam tulisan ini. Tulisan ini berfokus pada beberapa hal pokok berikut. *Pertama*, menjelaskan politik identitas secara singkat dan sejauh perlu. *Kedua*, menjelaskan era *post-truth* secara garis besar. *Ketiga*, menguraikan biografi singkat dan pemikiran Ludwig Wittgenstein tentang *Language Games* sebagai terang bagi fenomena politik identitas di Indonesia.

2. Metode

Metode yang peneliti gunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan atas fenomena politik identitas keagamaan di Indonesia dalam terang pemikiran Ludwig Wittgenstein tentang *language games*. Peneliti menyajikan tulisan ini dengan merujuk pada beberapa literatur yang berbicara mengenai politik identitas, *post-truth* dan tentunya pemikiran Wittgenstein, baik berupa buku, jurnal, maupun artikel. Melalui sumber-sumber tersebut, peneliti kemudian melakukan analisis seputar politik identitas era *post-truth* di Indonesia dalam terang *language games* menurut Ludwig Wittgenstein. Hasil analisis dan olahan kemudian disajikan oleh peneliti secara naratif dengan menampilkan berbagai fakta, peristiwa, dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan tema pembahasan tulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Politik identitas merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia era *post-truth* ini. Identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural, selain merupakan sebuah kekayaan yang membanggakan, nampaknya oleh kelompok-kelompok tertentu dianggap sebagai sebuah realitas yang mesti ditolak bahkan disingkirkan. Situasi ini seolah-olah didukung dengan latar waktu sekarang yakni era *post-truth* ini, di saat kebenaran tidak lagi mudah untuk dikenali secara objektif karena adanya unsur politik kepentingan oleh segelintir pihak dan gerakan, yang melibatkan aspek emosional masyarakat atau publik.

Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan Indonesia seperti yang dicanangkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa tahun belakangan ini berbagai peristiwa konflik dan perpecahan yang berkedok agama marak terjadi di Indonesia. Munculnya isu wacana konsep khilafah di Indonesia semakin menandakan urgensi adanya ancaman keberlangsungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di bawah panji Pancasila dan Kebhinnekaan. Maka dari itu, melalui tulisan ini, peneliti mengusung pemikiran Ludwig Wittgenstein, yakni *language games*, yang sekiranya dapat menjadi terang bagi fenomena politik identitas di Indonesia, khususnya pada era *post-truth* dewasa ini.

a. Selayang Pandang tentang Politik Identitas

Politik identitas secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu politik dan identitas. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *politeia* atau *polis* yang artinya adalah negara atau kota. Sementara itu, secara etimologis identitas berasal dari kata *identity* yang artinya sebuah ciri yang melekat pada seseorang atau kelompok misalnya suku, ras, agama, golongan tertentu yang membedakan dengan yang lainnya. Secara teoritis, politik identitas menurut Armada Riyanto adalah politik primordial yang dalam pelaksanaannya sebagian politikus dan *elite* memaknainya dalam ranah keturunan, wilayah geografis kedaerahan suku, serta dalam kategori ideologi dan agama (Herianto & Wijanarko, 2022). Hal senada juga diungkapkan Lumantoro bahwa politik identitas adalah politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan (Nasrudin, 2018). Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh Dinna Wisnu, bahwa penggunaan identitas dan politik identitas adalah taktik pengalih perhatian, cara yang sering digunakan untuk mengalihkan dan menyamarkan kepentingan kelas, atau musuh yang tidak disebut namanya (Wisnu, 2019). Agnes Haller juga mendefinisikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama (Y. S. Lestari, 2018). Sama halnya dengan Donald L Morowitz, pakar politik dari Universitas Duke mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak (Haboddin, 2012).

Dari berbagai argumen tersebut, ada nada yang serupa dalam politik identitas, yakni politik perbedaan atas dasar keprimordialan. Fakta pluriformitas bangsa Indonesia yang berusaha disangkal dengan berbagai kepentingan singular kelompok tertentu dalam politik identitas adalah sebuah ironi. Tidak heran bahwa konflik akan mudah tersulut ketika isu tersebut diangkat ke ranah publik atau masyarakat Indonesia. Politik identitas yang berlandaskan pada kesamaan identitas seringkali menjadi penyebab utama munculnya konflik politik terutama berkaitan dengan ketegangan antara kelompok superior dan inferior ataupun antara mayoritas dengan minoritas (Y. S. Lestari, 2018). Dan kerap kali korbannya adalah kelompok minoritas sebagai “mangsa mudah” bagi kegilaan sekelompok beragama yang memuja kekuasaan dengan memenggal prinsip-prinsip kemanusiaan” (Riyanto, 2018).

Fenomena politik identitas yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini telah menunjukkan taringnya sebagai sebuah ancaman serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi kalau nuansa politik identitas itu diperkeruh dengan berbagai peristiwa diskriminatif yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Salah satunya adalah peristiwa pembunuhan empat warga Poso beberapa waktu lalu. Empat orang menjadi korban kebuasan gerakan radikalisme berbasiskan terorisme dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah pada tanggal 11 Mei 2021 (Djunaedy, 2022). Peristiwa-peristiwa teror bernada agama semacam itu beresiko semakin memperkeruh situasi konflik politik identitas dan berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa.

Beberapa peristiwa di Indonesia yang paling menarik perhatian beberapa tahun terakhir adalah polemik politik identik dalam kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 yang lalu. Salah satunya adalah polemik Pilkada DKI Jakarta 2017 melibatkan Basuki Cahaya Purnama atau yang biasa disebut Ahok. Hal itu berawal ketika Ahok sebagai Gubernur DKI melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 (BBC News, 2016b). Dalam kesempatan itu, Ahok menyebutkan Surat Al-Maidah 51 dalam sambutannya di hadapan warga, yang memancing reaksi prokontra dari publik (D. Lestari, 2019). Sebagian besar umat Islam termasuk majelis hukum menganggap bahwa Surat Al-Maidah telah dinistakan oleh Ahok dalam pidato tersebut (Atriana & Mardiasuti, 2017). Ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Mataram, Mahyuni, juga mengungkapkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berbicara di luar konteks program budidaya ikan dalam kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, 27 September lalu (Olyvia, 2017). Selain tanggapan verbal, polemik tersebut bahkan sampai memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 4 November 2016 yang lalu, dengan melibatkan sekitar 50.000 orang. Di sisi lain, tidak sedikit juga pihak yang merasa tidak setuju dengan proses dan keputusan peradilan terhadap Ahok. Banyak pihak dan tokoh yang merasa pengambilan keputusan peradilan terhadap Ahok ditunggangi oleh prinsip subjektif dan tekanan-intervensi massa (BBC News, 2016a). Berdasarkan hasil survei Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SRMC) terungkap bahwa sebanyak 21,5 persen menyatakan tidak setuju pernyataan Ahok menistakan agama Islam (Prastiwi, 2016). Polemik tersebut nampaknya cukup dipengaruhi oleh isu politik identitas yang dibarengi dengan situasi zaman *post-truth* dewasa ini.

Post-truth, menurut *Kamus Oxford*, “berhubungan dengan atau menunjukkan situasi di mana perasaan dan keyakinan pribadi lebih besar pengaruhnya terhadap opini publik daripada fakta obyektif (Parani dkk., 2018; Setiawan, 2021; Wisnu, 2019). *Post-truth* menarik emosi dan lebih dari sekadar fakta dan bukti (Suharyanto, 2019). Dengan kata lain, emosi dan kepercayaan pribadi lebih memengaruhi opini publik daripada fakta objektif (Kurniawan, 2018). Hal serupa diungkapkan Burhanudin Muhtadi bahwa politik identitas sering dipakai sebagai *winning template* yang biasanya dikawin-kawinkan dengan strategi *post-truth*. Dalam dunia politik, politik identitas dianggap lebih bertuah jika dibandingkan dengan data dan fakta (Tansal, 2019).

Pada era pascakebenaran ini, ego pribadi menjadi pendorong utama. Fakta dan opini menjadi dua hal yang sengaja disamakan dan dicampuradukkan demi memuluskan kepentingan kelompok tertentu. Hal tersebut semakin memudahkan melalui sarana strategis berupa produk zaman ini, yakni media sosial. Media sosial membuat segala informasi dapat dengan mudah dijangkau dan disebar, tanpa terkecuali berita-berita yang tidak benar. Di era ini, kebenaran tidak lagi dipandang secara objektif karena orang akan memercayai apa pun yang ingin mereka percayai. Para politikus era ini berusaha merayu publik untuk percaya pada sesuatu walaupun tanpa bukti, dan ini adalah cara termudah untuk meraih status atau jabatan politik.

b. Merawat Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif *Language Games* Wittgenstein

Ludwig Josef Johann Wittgenstein atau yang biasa dikenal Ludwig Wittgenstein adalah seorang filsuf analitik di abad XX. Pemikirannya terbagi menjadi dua tahap atau dua periode, berdasarkan dua karya besar yang dituliskannya yakni Wittgenstein I dalam periode karya *Tractatus Logico-Philosophicus* dan Wittgenstein II dalam periode karya *Philosophical Investigations* (Bertens, 1981). Apabila arah pemikiran Wittgenstein periode pertama terarah pada penentuan bahasa ideal yang seragam (*uniformity*) bagi filsafat. Arah pemikiran Wittgenstein periode kedua ialah menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya yang beranekaragam (*pluriformity*) (Mustansyir, 1995). Kedua arah pemikiran Wittgenstein ini mengandung dasar filosofis tentang persoalan *unity and plurality*. *Unity* dan *plurality* dalam konteks Indonesia itu digagas dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa.

Berkaitan dengan tema *unity* dan *plurality*, fenomena politik identitas yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini adalah suatu permasalahan serius, bahwa suatu fakta pluralitas berusaha disingkirkan oleh gerakan primordial ekstrim yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Padahal sejatinya, kebhinnekaan merupakan suatu fakta alamiah sekaligus konsensus sosio-politik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia (Hasan & Raharso, 2017). Maka dari itu, segala bentuk diskriminasi, termasuk dalam hal ini soal politik identitas, adalah sebuah pengkhianatan terhadap Pancasila sebagai sebuah payung dalam hidup bersama, berbangsa-bernegara, dan bermasyarakat. Padahal pasca kemerdekaan bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjunjung tinggi nilai identitas nasional yang bersumber dari nilai persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan (Alfaqi, 2015).

Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, tetapi tetap satu) adalah jati diri bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan realitas kehidupan bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai prinsip dalam hidup bersama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di tengah kemajemukan yang ada. Begitu juga dengan Pancasila yang hadir sebagai norma dasar, cita hukum (*rechtsidee*), dasar filosofis (*philosophische gronslag*), pandangan hidup (*weltanschauung*), ideologi nasional, dasar negara, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia berhulu dari dan bermuara pada kebhinnekaan itu (Hasan & Raharso, 2017). Pancasila berperan sebagai substansi normatif yang memberikan pedoman agar nilai-nilai kehidupan bersama seperti toleransi, kebebasan, persamaan, solidaritas, ketaatan terhadap hukum, dan pantang akan kekerasan tetap dijaga dan dipegang teguh (Madung, 2013). Dengan demikian, Pancasila sejatinya merupakan ideologi pluralis. Di satu sisi, kemajemukan atau pluralisme merupakan kekayaan bangsa, namun di sisi lain pluralisme dapat menjadi sumber persoalan.

Menurut penulis, kemajemukan tersebut dapat dianalisis dari pemikiran Wittgenstein. Pemikiran *language games* Wittgenstein kiranya dapat memberi sumbangsih positif untuk merawat kebhinnekaan bangsa Indonesia. Menurut hemat penulis, ada tiga sumbangsih yakni, “Pluriformitas dan Kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika”, “Diferensiasi Bahasa Agama dan Bahasa Politik”, dan “Berpolitik secara Sehat dan Berpikir Kritis”.

1) Pluriformitas dan Kesatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika

Indonesia merupakan bangsa yang multikultural, di mana masyarakatnya memiliki fakta pluriformitas latar belakang suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Meskipun memiliki aneka

perbedaan latar belakang, nilai persatuan dan kesatuan tidaklah dilupakan. Hal tersebut nyata dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yakni semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (Welianto, 2019).

Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna yang amat mendalam bagi bangsa Indonesia. Selain karena perjalanan panjang dalam proses kelahirannya oleh para fundator bangsa, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia untuk mengatasi keanekaragaman yang ada sekaligus mencegah timbulnya konflik. Rizal Mustansyir berpendapat bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah upaya untuk mempersatukan masyarakat yang majemuk dengan latar belakang budaya yang beragam (Mustansyir, 1995). Konsep ini memiliki tujuan politik, namun juga harus dipandang sebagai kebijakan budaya yang mendasar yang dirancang untuk membangun karakter dan peradaban yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang plural (Parani dkk., 2018). Semangat toleransi beragama sejatinya merupakan elemen penting dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika mewakili sebuah gerakan menuju persatuan, berdasarkan pemahaman, perbedaan yang justru memperkaya interaksi manusia (Parani dkk., 2018). Dalam hal ini, semboyan tersebut mencerminkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia yang dapat dianalisis dengan konsep pluriformitas. Pluriformitas Indonesia merupakan suatu fakta objektif. Keanekaragaman tersebut menyadarkan manusia akan adanya otonomi, adanya *language games* masing-masing yang tidak dapat dicampuradukkan.

Di dalam gagasan *language games*, pluriformitas juga menjadi arah dan landasan pemikiran Wittgenstein. Wittgenstein mendasarkan pemikirannya pada pengalaman empiris saat mengamati realitas keanekaragaman permainan bahasa (*language games*). Beranjak dari situ, ia merasa perlunya memberi klasifikasi atas tiap-tiap permainan bahasa, serta memahami dan membedakan aturan permainan dalam berbagai permainan bahasa tersebut. Maka dari itu, *language games* Wittgenstein dapat dipakai sebagai analisis bagi Bhinneka Tunggal Ika demi memperjuangkan kesatuan di tengah keanekaragaman dan perbedaan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa keanekaragaman adalah fakta kehidupan manusia yang merupakan kodrat-alamiah dan mustahil untuk diingkari (Mustansyir, 1995). Bagi Wittgenstein dalam *language games*-nya, perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan harus dihargai.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Wittgenstein kiranya dapat juga menjadi bahan permenungan dalam menginstropeksi kalimat atau semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam fungsi penggunaannya bagi persatuan dan kesatuan bangsa (*the meaning is in the use*). Di dalam semboyan tersebut terkandung latar belakang historik bangsa Indonesia yang beranekaragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama (Juhansar et al., 2021). Selain itu, di dalamnya terkandung kesatuan dan kesamaan kesadaran, cita-cita, semangat, dan tujuan. Kesatuan itu didasarkan pada kesamaan historis, yakni penderitaan yang sama-sama dialami dan perjuangan yang sama-sama diusahakan pada era penjajahan. Artinya, di dalam keanekaragaman (pernah) ada kesatuan dan cita-cita bersama. Atas dasar pemikiran Wittgenstein inilah, kiranya masyarakat Indonesia melihat adanya fakta keanekaragaman tersebut sebagai suatu harmoni antara keanekaragaman dan idealisme menciptakan kesatuan dan persatuan. Sebab, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri merupakan cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaragaman dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri keaneka-an (Mustansyir, 1995). Dari sini dapat nampak adanya kesamaan penekanan pada aspek pragmatis antara *Language Games* Wittgenstein dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kegunaannya demi terciptanya komunikasi dan relasi yang baik antarumat manusia.

2) Diferensiasi Bahasa Agama dan Bahasa Politik

Seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, agama merupakan “permainan tersendiri” yang mempunyai *language games* tersendiri yang tidak bisa dicampuradukkan seenaknya demi kepentingan kelompok maupun individu tertentu. Agama dan politik merupakan dua permainan yang sama sekali berbeda dan mempunyai aturannya masing-masing yang mesti dipatuhi. Percampuradukkan *language games* agama dan politik demi kepentingan politik kelompok atau individu tertentu dapat menyebabkan konflik atau *chaos*.

Di Indonesia, percampuradukkan *language games* antara agama dan politik sangat marak terjadi. Ironisnya hal tersebut dilakukan atas dasar kesengajaan dan kesadaran untuk memecah-belah persatuan bangsa demi kepentingan kelompok tertentu. Kelompok-kelompok tersebut menyadari bahwa menggunakan *language games* agama untuk kepentingan politik merupakan senjata yang ampuh dan laris untuk memuluskan usaha mereka. Dapat dibilang isu agama begitu “seksi” ketika dicampuradukkan dalam kancah politik. Hal tersebut secara nyata terbukti pada

kasus yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok tahun 2017 silam (terlepas dari benar-salahnya kasus tersebut secara hukum). Dari sini, penulis hendak melihat keterkaitan antara permainan bahasa dengan situasi politik-religius yang sedang ramai terjadi di Indonesia.

Kasus lain juga terjadi pada tahun 2019 yang lalu, yakni menjelang pesta demokrasi bangsa Indonesia, pemilu calon presiden dan wakil presiden. Kedua paslon calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai masing-masing diserang oleh isu-isu negatif soal agama melalui pesan berantai di media sosial. Salah satu paslon capres dan cawapres dituduh sebagai antek Zionis, antek Amerika, antek Cina, kafir, dan bahkan dituduh menyandang nama baptis orang kudus dalam Gereja Katolik. Sementara paslon capres dan cawapres yang lain mendapat tuduhan sebagai antek Cina, antek asing, radikal, dan khilafah. Ironisnya, berdasarkan statistik data pada salah satu media sosial, tuduhan isu-isu negatif tersebut belum berhenti saat pemilu usai melainkan masih terus berlanjut. Bahkan, sebaran isu negatif di salah satu media sosial tercatat lebih banyak ditemukan se usai pemilu. Artinya, budaya menyebarkan isu-isu negatif bukan hanya sebatas demi kepentingan politik kelompok tertentu, melainkan telah mendarah daging pada kelompok atau individu tertentu di Indonesia. Prof. Greg Barton dari Universitas Deakin, Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa dengan menggunakan tindakan ekstrimisme agama dalam kepentingan pribadi sangatlah berbahaya, apalagi jika dipergunakan untuk kepentingan politik (*Menilik Isu Agama Dalam Dunia Politik*, 2020). Kegiatan mencampuradukkan *language games* agama dan *language games* politik rentan menimbulkan konflik yang dapat memecah belah persatuan bangsa, apalagi di negara yang multikultural seperti Indonesia.

Pemikiran *language games* Wittgenstein kiranya menjadi sebuah terang untuk menjawab permasalahan politik religius yang terjadi di Indonesia. Terkait dengan keanekaragaman budaya dan agama di Indonesia yang berbeda satu sama lain, perlu disadari bahwa setiap budaya dan agama memiliki *language games* masing-masing yang harus dipahami demi dialog dan toleransi dalam hidup bersama. Bagi Wittgenstein, agama dan teologi mempunyai *language game* tersendiri, yang bagi orang beragama mempunyai arti (makna) (Jacobs, 2002). Pemahaman ini tidak hanya soal pengucapan atau simbol-simbol secara fisik, melainkan juga soal pemahaman latar belakang historis suatu gagasan dalam *language games* setiap kelompok. Pengetahuan akan gagasan *language games* dari masing-masing kelompok tersebut kiranya juga dapat memperkaya khazanah masing-masing kelompok sehingga perbedaan antarkelompok dapat semakin dipahami sebagai kekhasan masing-masing.

Pemikiran Wittgenstein ini kiranya perlu juga dihayati oleh para pemimpin negara di Indonesia, sebagai yang memegang peranan penting bagi roda pemerintahan negara. Sadar akan adanya keanekaragaman *language games* pada tiap kelompok budaya dan agama, penting bagi para pemimpin negara untuk memilah secara teliti *language games* yang mereka gunakan dalam ruang publik politis. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih antar *language games* yang rawan menimbulkan konflik. Konflik yang sering terjadi dewasa ini menjadi perhatian bagi siapa pun akan pentingnya untuk tidak mencampuradukkan *language games* yang satu dengan yang lainnya.

Language Games agama tentu berbeda dengan *language games* politik dalam penggunaannya. Pedoman aturan pada *language games* agama adalah bagaimana para penganutnya menerapkan ajaran-ajaran iman agamanya sebagai implementasi pemahamannya akan Allah. Sedangkan pedoman aturan pada *language games* politik adalah bagaimana para politisi atau manusia dalam hak, wewenang, dan kewajibannya memiliki keutamaan etis demi mewujudkan kesejahteraan dalam hidup bersama. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah orang yang menganut agama (minoritas) tertentu meskipun mempunyai *attitude* dan rekam jejak berpolitik yang baik tidak boleh memimpin negara? Apakah orang tersebut tidak lebih baik dari orang lain yang menganut agama (mayoritas) tertentu? Jadi, apakah tepat menjadikan agama sebagai syarat dan ketentuan dalam berpolitik?

Pemikiran Wittgenstein tentang keanekaragaman *language games* kiranya dapat menjadi terang dalam membedakan antara ranah politik dan ranah agama. Keduanya mempunyai hidup dan aturannya masing-masing bagi setiap individu maupun kelompok yang menjadi bagian di dalamnya, yang tidak boleh dicampuradukkan dalam penggunaannya. Seperti gagasan Wittgenstein bahwa setiap bidang kehidupan bergerak sesuai dengan aturan mainnya sendiri-sendiri, sebagaimana halnya cara Bergeraknya biji-biji catur di atas papan catur. Langkah bidak berbeda dari langkah kuda, menteri, raja, maupun gajah (Mustansyir, 2007). Begitu juga dengan bahasa agama dan bahasa politik, yang berbeda satu sama lain.

Menurut hemat penulis, masyarakat Indonesia lagi-lagi harus kembali merenungkan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam memahami perbedaan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, kesadaran akan adanya perbedaan *language games* kiranya bukanlah penghalang untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, utamanya di bidang politik. Masyarakat Indonesia kiranya tidak lagi memperbincangkan soal “orang dari golongan agama manakah yang layak memimpin negara”, melainkan “siapakah yang layak memimpin negara karena keutamaan etis mereka”. Maka dalam konteks politik di Indonesia, senada dengan pemikiran Wittgenstein bahwa arti sesuatu adalah tergantung dari penggunaannya, siapapun layak menjadi pemimpin negara sejauh ia menggunakan jabatan politisnya secara baik dan benar.

3) Berpolitik secara Sehat dan Berpikir Kritis

Dari pihak politisi sendiri, perlu lebih berfokus kepada narasi politik sehat yang mempersatukan dan mendamaikan para pendukungnya dengan mengedepankan rasionalitas, bukan malah mengeksploitasi unsur emosionalitas demi kepentingan kelompok agama tertentu. Bahkan, elit-elit politik sudah seharusnya lebih mengedepankan isu-isu nasional yang membangun secara progresif dan substantif di dalam narasi-narasi politiknya. Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun harus mulai cerdas untuk berpikir rasional dan kritis, terutama dengan isu-isu politik dan agama yang cenderung dimanipulasi oleh kaum elit politik. Preferensi politik masyarakat harus lebih didasarkan pada keberanian berpikir sesuai nalar rasionalnya di tengah cengkeraman elit-elit dan otoritas politik keagamaan. Keberanian dalam berpikir rasional dan menjadi individu yang kritis itulah yang akan membantu terciptanya masyarakat yang terbuka serta toleran dalam menghadapi isu-isu sosial-politik atau politik keagamaan.

Hal yang patut disyukuri adalah bahwa masih banyak kalangan menyadari ancaman tersebut dan bermunculan jargon ideologis nasionalis seperti, “Saya Indonesia, Saya Pancasila”, di berbagai media massa. Hal tersebut sejatinya merupakan pesan simbolis dari kelompok masyarakat atau warga negara yang melawan isu politik-religius. Mereka ingin mewujudkan praksis politik nasional yang religius (bukan agamis), humanis, integral-integratif, demokratis dan berkeadilan sosial dan sekaligus menghargai keanekaragaman sebagai *modus essendi* manusia Indonesia (Mustansyir, 2007). Maka dari itu, perlu selalu dihayati secara personal oleh tiap-tiap warga Indonesia dan didengungkan di segala penjuru bumi Indonesia bahwa keberagaman adalah bentuk natural dari kehidupan dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia.

4. Simpulan dan Saran

Indonesia adalah bangsa yang berdiri dalam satu semangat yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pluriformitas (keanekaragaman) adalah fakta objektif yang menjadi bagian integral bangsa Indonesia yang tidak boleh disangkal dan apalagi disingkirkan oleh berbagai bentuk usaha picik yang berusaha mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Keanekaragaman tersebut harusnya menyadarkan manusia akan adanya otonomi, adanya *language games* masing-masing yang tidak dapat dicampuradukkan, melainkan harus selalu dihargai dan ditaati peraturannya. Senada dengan tesis Wittgenstein “*the meaning is in the use*”, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam fungsi penggunaannya bagi persatuan dan kesatuan bangsa terkandung latar belakang historis bangsa Indonesia yang beranekaragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Namun, di dalamnya juga terkandung kesatuan dan kesamaan kesadaran, cita-cita, semangat, dan tujuan. Kesatuan itu didasarkan pada kesamaan historis, yakni penderitaan yang sama-sama dialami dan perjuangan yang sama-sama diusahakan pada era penjajahan. Artinya, di dalam keanekaragaman (pernah) ada kesatuan dan cita-cita bersama. Atas dasar pemikiran Wittgenstein inilah, kiranya masyarakat Indonesia dapat melihat adanya fakta keanekaragaman tersebut sebagai suatu harmoni antara keanekaragaman dan idealisme demi menciptakan persatuan dan kesatuan di antara setiap warga negara Indonesia.

Selain itu, kesadaran akan keanekaragaman *language games* yang ada pada tiap kelompok budaya dan agama di Indonesia mesti dipilah secara teliti tanpa percampuradukkan demi terhindar dari konflik, khususnya *language games* yang mereka gunakan dalam ruang publik politis. *Language games* agama tentu berbeda dengan *language games* politik dalam penggunaannya. Pedoman aturan pada *language games* agama adalah bagaimana para penganutnya menerapkan ajaran-ajaran iman agamanya sebagai implementasi pemahamannya akan Allah. Sedangkan pedoman aturan pada *language games* politik adalah bagaimana para politisi dalam hak, wewenang, dan kewajibannya memiliki keutamaan etis demi mewujudkan kesejahteraan dalam hidup bersama. Keduanya mempunyai hidup dan aturannya masing-masing

bagi setiap individu maupun kelompok yang menjadi bagian di dalamnya, yang tidak boleh dicampuradukkan dalam penggunaannya. Seperti gagasan Wittgenstein bahwa setiap bidang kehidupan bergerak sesuai dengan aturan mainnya sendiri-sendiri, sebagaimana halnya cara Bergeraknya biji-biji catur di atas papan catur. Langkah bidak berbeda dari langkah kuda, menteri, raja, maupun gajah. Begitu juga dengan bahasa agama dan bahasa politik.

Meskipun begitu, kesadaran akan adanya perbedaan *language games* kiranya bukanlah penghalang untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, utamanya di bidang politik. Sudah seharusnya masyarakat Indonesia tidak lagi memperbincangkan soal “orang dari golongan agama manakah yang layak memimpin negara”, melainkan “siapa yang layak memimpin negara karena keutamaan etis mereka”. Maka dalam konteks politik di Indonesia, senada dengan pemikiran Wittgenstein bahwa arti sesuatu adalah tergantung dari penggunaannya, siapapun layak menjadi pemimpin negara sejauh ia mempunyai keutamaan-keutamaan etis dan mampu menjalankan jabatan politisnya secara baik dan benar demi *bonum commune* bangsa Indonesia.

5. Daftar Pustaka

- Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28 No. 2, 111–116.
- Atriana, R., & Mardiasuti, A. (2017, Mei). *Hakim: Ahok Merendahkan Surat Al-Maidah 51*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51>.
- Bakker, A. (1984). *Metode-Metode Filsafat*. Ghalia Indonesia.
- BBC News. (2016a, November). *Inilah Kasus-Kasus Penistaan Agama di Indonesia, “Subjektif” dan “Ada Tekanan Massa”*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552>.
- BBC News. (2016b, November). *Pidato di Kepulauan Seribu dan Hari-Hari hingga Ahok menjadi Tersangka*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>.
- Bertens, K. (1981). *Sejarah Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Penerbit PT. Gramedia.
- Daryanto, A. (2022). Membaca Gerak Roh di Era Pasca-Kebenaran: Analisis Pneumatologis Video “Propaganda Anti-Islam” Robert Spencer. *Jurnal Ledalero*, 21(1), 1–19. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i1.260.1-19>
- Djunaedy, E. (2022, September). *Polisi Klaim “Anggota Terakhir Teroris Poso” Tewas Ditembak - “Pak Guru Jago Merakit Bom”*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-63085237>.
- Eko Suharyanto, C. (2019). Analisis Berita Hoaks di Era Post-Truth: Sebuah Review. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Vol. 10 No. 2, 37–49.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics*, Vol. 3 No. 1, 109–126. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>.
- Hasan, H., & Raharso, A. T. (ed). (2017). Merawat Kebinekaan, Membumikan Pancasila. Dalam *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Vol. 27 No. Seri 26* (hlm. 3–25). Malang: STFT Widya Sasana.
- Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 53–64.
- Hilmy, M. I. (2020). Fenomena Gerakan Populisme Dalam Kemunduran Demokrasi. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 145–156. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13080>
- Jacobs, T. (2002). *Paham Allah*. Kanisius.
- Juhansar, J. M. Pabbajah, and H. Jubba, “Relasi Agama dan Budaya dalam Tradisi Dui Menre pada Pernikahan Masyarakat Bugis”, Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan, vol. 21, no. 2, pp. 15-28, Oct. 2021.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama di Tahun Politik Pasca Kebenaran di Indonesia dan Ancaman bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12 No. 1, 133–154.

- Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Mandala*, Vol. 4 No. 4, 12–16. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index>.
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1), 19–30.
- Madung, O. G. (2013). *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Ledalero.
- Menilik Isu Agama dalam Dunia Politik*. (2020, Juni). Universitas Islam Indonesia. <https://www.uii.ac.id/menilik-isu-agama-dalam-dunia-politik>.
- Mustansyir, R. (1995). Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik. *Jurnal Filsafat*, 22.
- Mustansyir, R. (2007). *Filsafat Analitik: Sejarah, Perkembangan, dan Peranan Para Tokohnya*. Pustaka Pelajar.
- Nasrudin, J. (2018). Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1 No. 1, 34–47.
- Olyvia, F. (2017, Februari). Saksi Ahli Sebut Pidato Ahok di Pulau Pramuka di Luar Konteks. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170213172057-12-193228/saksi-ahli-sebut-pidato-ahok-di-pulau-pramuka-di-luar-konteks>
- Parani, R., Pramesuari, A., Maldiva, D. M., & Felicia, E. (2018). Mempertanyakan Kembali Bhinneka Tunggal Ika Di Era Post Truth Melalui Media Sosial. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 59–69. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i2.953>
- Prastiwi, D. (2016, Desember). Survei: 87,1% Warga Belum Tonton Video Ahok Diduga Menista Agama. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/news/read/2673788/survei-871-warga-belum-tonton-video-ahok-diduga-menista-agama>
- Riyanto, A. (2014). *Katolisitas Dialogal: Ajaran Sosial Katolik*. Kanisius.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas - Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Kanisius.
- Riyanto, A. (ed). (2021). *Teologi Publik: Sayap Metodologi dan Praktis*. Kanisius.
- Riyanto, A. (ed), Madung, O. G. (ed), Mulyatno, C. B. (ed), & Ohoitmur, J. (ed). (2015). *Kearifan Lokal Pancasila: Butir-butir Filsafat Keindonesiaan*. Kanisius.
- Setiawan, I. (2021). *Media Sosial, Politik Post-Truth, dan Tantangan Kebangsaan*. Kompasiana.
- Tansal, E. A. (2019). *Representasi Isu Politik Identitas*. UIN Alauddin Makassar.
- Welianto, A. (2019). Bhinneka Tunggal Ika: Arti dan Maknanya. *Kompas*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/15/080000269/bhinneka-tunggal-ika-arti-dan-maknanya>.
- Wijanarko, R. (2021). Religious Populism and Public Sphere in Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1–9. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v0i0.8547>.
- Wisnu, D. (2019). *Populisme, Politik Identitas, dan Erosi Demokrasi di Abad ke-21: Refleksi dari Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali 2018*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
- Wittgenstein, L., & Anscombe, G. E. M. (ptj). (1967). *Philosophical Investigations*. Basil Blackwell Ltd.